

Ijtihad Bersihkan Malang dari Korupsi

Submit by [zenefale](#) on **October 22, 2018** | From **Malang Post**, **Senin 24 September 2018** edition

Pasca ditetapkannya 22 tersangka baru oleh KPK total anggota DPRD kota Malang yang tersandung korupsi suap P-APDB 2015 sebanyak 41 dari 45 anggota. Selain itu di sisi eksekutif mantan walikota Malang Moh Anton dan mantan kepala dinas PU jarot Edy Sulistiono juga telah divonis pengadilan tindak pidana korupsi Jawa Timur. Terungkapnya kasus korupsi suap perubahan APBD 2015 menjadi penanda bahwa pemerintahan kota Malang telah mengalami degradasi moral dan integritas.



MALANG POST

SENIN 24 SEPTEMBER 2018

IJTIHAD BERSIHKAN MALANG DARI KORUPSI

Pasca ditetapkannya 22 tersangka baru oleh KPK total anggota DPRD Kota Malang yang tersandung korupsi suap P-APBD 2015 sebanyak 41 dari 45 Anggota. Selain itu, di sisi eksekutif mantan walikota Malang Moh. Anton dan mantan kepala dinas PU Jarot Edy Sulistiono juga telah divonis pengadilan tindak pidana korupsi Jawa Timur. Terangkasnya kasus korupsi suap perubahan APBD 2015 Kota Malang menjadi penanda bahwa pemerintahan Kota Malang telah mengalami degradasi moral dan integritas.

Korupsi telah menjadi momok menakutkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi penyebab utama kegagalan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Disisi lain, korupsi justru dipelihara oleh oknum-oknum di internal pemerintahan sebagai cara untuk memperkaya diri sendiri dan sarana memperkuat lingkaran kekuasaannya (criminal syndicate). Korupsi telah mengakar begitu kuat dan dalam, sehingga menjadi kebiasaan (habit) yang dimaklumi. Kondisi ini tentu patut untuk diwaspadai dan dilawan. Melawan korupsi tidak bisa secara parsial, melainkan harus dengan menggerakkan segala macam daya dan upaya.

Salah satu persoalan yang

dihadapi dalam pemberantasan korupsi adalah belum terkonsolidasinya niat dan tindakan dari seluruh stakeholder yaitu pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, masyarakat sipil dan elemen lainnya untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy). Pada akhirnya pemberantasan korupsi hanya menjadi agenda kelompok-kelompok tertentu yang dipandang sebagai gerakan elitus yang tertutup (eksklusif). Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi domain dari aparat penegak hukum semata, melainkan harus menjadi agenda kita bersama. Masing-masing orang harus mengambil peran dan tugas untuk mengupayakan agar korupsi tidak berkembang dan beranak pinak.

Era Baru Pemerintahan Kota Malang

Pelantikan Walikota Malang idealnya menjadi momentum untuk memulai tatanan baru. Bukan hanya makna melambungkan jargon "malang dari 0", melainkan dengan berkomitmen secara serius untuk melakukan perubahan dan perbaikan tanpa menghilangkan ismian korupsi yang telah terjadi. Persoalan korupsi harus tetap menjadi penanda dan pengingat agar pemerintah kota malang tidak kembali melakukan hal

yang serupa, dalam artian tidak melakukan korupsi.

Walikota Malang yang baru memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan; Pertama, Walikota Malang harus mengembalikan kepercayaan publik yang telah runtuh akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kota Malang. Paling tidak Walikota secara terbuka menyampaikan kepada publik untuk berkomitmen penuh melawan korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan. Kedua, membangun sistem pencegahan korupsi, utamanya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seperti diketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari anggaran yang ada di dalam APBD. Masih banyak sekali potensi pendapatan daerah yang hilang atau bocor misalnya pendapatan di sektor pajak dan retribusi parkir, sektor pajak hiburan, hotel dan restoran serta pajak dan retribusi lainnya. Sedangkan dalam hal belanja, masih banyak ditemukan belanja dalam pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. Catatan Malang Corruption Watch (MCW) berdasarkan LHP BPK tahun 2015-2017 terdapat temuan yang terus berulang kaitannya dengan sejumlah proyek



Oleh:

M. Fahrudin Andriyansyah

KOORDINATOR MALANG CORRUPTION WATCH
BIDANG HUMAS DAN PENGARAHAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang bermasalah, yaitu dengan catatan kekurangan volume/spesifikasi dan keterlambatan pengerjaan. Di sisi lain terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dalam proses pengadaan barang dan jasa sebatas formalitas. Dimana pemegang tender/proyek sudah ditentukan sedari awal sebelum proses pengadaan barang dan jasa dilakukan.

Ketiga, Kota malang masih menjadi daerah dengan predikat tertutup terkait dengan informasi publiknya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih buruknya pengelolaan dokumentasi dan informasi daerah. Dokumen-dokumen publik yang seharusnya terbuka

masih sulit diakses oleh publik. Misalnya dokumen anggaran, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa serta dokumen publik lainnya. Tertutupnya pemerintahan menjadi pertanda bahwa pemerintahan tersebut mengarah pada perilaku korup. Oleh karena itu walikota harus memasukkan keterbukaan informasi sebagai program penting yang harus dilakukan. Keempat, minimnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilatarbelakangi minimnya ruang partisipasi yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan ruang yang seluas-luasnya dalam proses perencanaan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tidak hanya berhenti disitu saja, masyarakat juga harus terus diajak untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap program-program atau kebijakan pemerintah daerah. Jika dilakukan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan (pre-vilage) bagi masyarakat yang berani menyampaikan adanya dugaan korupsi.

Sumber Daya melimpah

Untuk mewujudkan Malang yang bebas dari korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kota Malang memiliki segala macam sumber daya yang dibutuhkan. Pertama, Sebagai kota yang dikenal dengan Kota Pendidikan, Kota Malang memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi merupakan tempat bagi kaum-kaum intelektual yang tentu selalu mengajarkan moralitas dan integritas. Pemerintah Kota Malang sayoganya selalu mengajak kampus untuk hadir membangun moralitas dan integritas di dalam internal pemerintah daerah. Kampus juga dapat diibatkan untuk

membangun sistem pencegahan korupsi yang mumpuni di internal pemerintah daerah. Kedua, Kota Malang juga memiliki banyak sekali lembaga-lembaga agama. Misalnya pesantren, pesantren dapat dilibatkan juga untuk membangun aparatur pemerintahan agar memiliki akhlak yang baik, jujur dan tidak tercela. Ketiga, media massa di Kota Malang tidak kurang-karangnya. Pemerintah Kota Malang dapat menjalin kerjasama yang aktif dengan media lokal untuk menyampaikan pendidikan anti korupsi.

Pada akhirnya, jika semua upaya itu dapat dilakukan secara optimal, maka Kota Malang bebas dari korupsi bukanlah sebatas mimpi. Kota Malang adalah milik kita, maka tugas kita semua untuk terus menggerakkan dan mendorong agar pemerintah daerah tetap ada dalam jalurnya yang benar. "Bersama Rakyat Berantas Korupsi". (*)